

SKRIPSI



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN MOTOR RACING PADA JALAN UMUM

(Studi Kasus di Polres Gowa tahun 2010-2012)

OLEH

MUH. HANAN S.

B 111 09 318

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PELANGGARAN PENGGUNAAN MOTOR RACING
PADA JALAN UMUM**

(Studi Kasus di Polresta Gowa tahun 2010-2012)

OLEH

MUH. HANAN S.

B 111 09 318

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN MOTOR RACING PADA JALAN UMUM

(Studi Kasus di Polres Gowa tahun 2010-2012)

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. HANAN S.
B 111 09 318**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi program sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 31 Mei 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.

NIP. 19680411 199203 1 003

Sekretaris



Hj. Nur Azisa S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

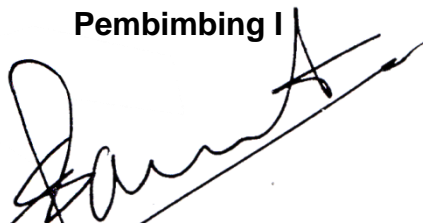
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MUH. HANAN S.**
Nomor Induk : **B 111 09 318**
Bagian : **HUKUM PIDANA**
Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PELANGGARAN PENGGUNAAN MOTOR RACING
PADA JALAN UMUM
(Studi Kasus di Polres Gowa Tahun 2010-2012)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Mei 2013

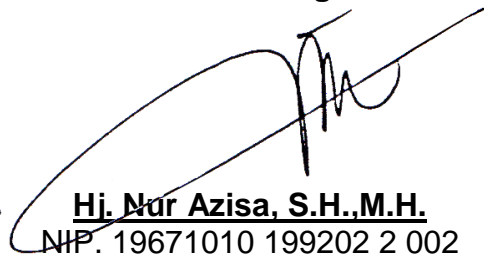
Pembimbing I



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.

NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing II



Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MUH. HANAN S.**
Nomor Induk : **B 111 09 318**
Bagian : **HUKUM PIDANA**
Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PELANGGARAN PENGGUNAAN MOTOR RACING
PADA JALAN UMUM
(Studi Kasus di Polres Gowa Tahun 2010-2012)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2013

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

MUH. HANAN S (B111 09 318), dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Penggunaan Motor Racing Pada Jalan Umum (Studi kasus di Polres Gowa Tahun 2010-2012)”, di bawah bimbingan Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H. dan Hj. Nur Azisa S.H., M.H, masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang faktor penyebab maraknya penggunaan motor racing pada jalan umum di Kabupaten Gowa dan upaya aparat kepolisian untuk meminimalisir penggunaan motor racing di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini dilaksanakan di jalan raya dan di Kesatuan Lalu Lintas Polres Gowa. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data yang berupa data primer yang diperoleh dari responden dengan menggunakan metode wawancara, sedangkan data sekunder berupa data penunjang yang diperoleh dari undang-undang, buku, jurnal, power point, dan data website, dan lainnya. Keseluruhan data tersebut adalah data kepustakaan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan analisis terhadap bahan-bahan yang diperoleh oleh penulis selama melakukan penelitian, maka diperoleh hasil : (1) Faktor-faktor penyebab penggunaan motor racing pada jalan umum yaitu faktor prestise, faktor usia remaja, faktor balapan, faktor pengaruh orang lain. (2) Upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk meminimalisir penggunaan motor racing yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan yaitu melaksanakan sosialisasi kepada para masyarakat melalui media cetak dan elektronik, melaksanakan giat patroli pada lokasi yang rawan dilakukannya aksi balapan liar, mengadakan *sweping* rutin guna menjaring sepeda motor yang tidak memenuhi kelengkapan berkendara, koordinasi atau sosialisasi dilakukan untuk mengajak dan menghimbau para pemilik bengkel atau toko alat-alat kelengkapan bermotor untuk tidak sembarang menjual Knalpot yang tidak sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, pemusnahan knalpot racing agar pelanggaran yang sama tidak terulang kembali, Melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kabupaten Gowa, serta pemasangan spanduk, baliho, dan pamflet yang biasa kita lihat di sepanjang jalan di Kabupaten Gowa tentang aturan dalam berkendara sepeda motor. Dan upaya represif (penindakan) yaitu penindakan tilang dan penahanan kendaraan bermotor (sepeda motor).

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan seluruh muslim di dunia ini.

Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini, baik materi, teknis maupun penyusunan kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda **Sulaeman** dan Ibunda **Hj. Saripa** beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi agar penyelesaian penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak **Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi SpBo** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Pembantu Rektor.
3. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H** dan Ibu **Hj. Nur Azisa, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II atas segala masukan, bantuan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak **Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H** selaku penguji I, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H** selaku penguji II, dan Bapak **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H** selaku penguji III.
6. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
7. Bapak Ajun Komisaris Polisi **Muhiddin Yunus SH. MH**, selaku Kasatlantas Polres Gowa beserta para Staf yang telah membantu saya dalam pengambilan data terkait dengan penulisan skripsi ini.
8. Keluarga besar **UKM Sepak Bola Fak. Hukum UNHAS**, kanda **Muhammad Basit SH**, selaku pelatih tim sepak bola Fak. Hukum Unhas yang telah banyak membagi ilmu dalam bermain sepak bola,

Para Ketua UKM Sepak Bola FH-UH di tiap periodenya, serta kanda-kanda dan teman-teman tim sepak bola fh-uh yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah berbagi pengalaman dalam mengikuti kompetisi sepakbola di lapangan maupun dalam perkuliahan di lingkungan fakultas. **VIVA THE YELLOW SUBMARINE !!!**

9. Tim **Jackdi 09 FC** (Andi Dede, Muh. Ilham, Iman Arnan, Achmad Imam, Reza Prasetya, Zulfikar, Mahsyar, Afham, Rahmat, Boim, Tonton, dll.) serta **FBI FC** (Coach A. Firdaus Samad SH, Managar Syamsuriadi Kasim SH, Ajat Sudrajat, Ahwani, Muh. Fandi, Affandi Haris Raharjo, Ali Ramadhana, Abdi Afandi, Chaerul Ramadhan, Muh. Hidayat, Qasman, Avil, Al Kasih, dll.) yang telah menampung saya dalam menyalurkan bakat dan memberikan kesempatan bermain sepak bola dalam turnamen Liga Hukum selama tahun 2010-2012.
10. Keluarga Besar Bapak **H. Andi Jamaluddin**, selaku Kepala Desa Salotengnga Kec. Sabbangparu Kab. Wajo beserta teman-teman seposko: **Muh. Tahta Saputra, Masril Rizal, Mahfuddin, Herman Setia Nugraha, Sitti Nurlin, Mutmainnah Zaenal dan Yulianti** yang telah banyak mengajarkan saya makna akan pengabdian terhadap masyarakat selama proses Kuliah Kerja Nyata Universitas Hasanuddin Gelombang 82.

11.Rekan-rekan di BEM dan DPM serta UKM-UKM yakni ALSA, LP2KI, MPM As-Syariah, CAREFA, GOJUKAI, Pers Mahasiswa, BSDK, dan Basket.

12.Teman-teman seperjuanganku dalam **DOKTRIN 09** dan **LAW FACULTY PARKING AREA** serta seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

13.Dan seluruh civitas akademika yang turut serta membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran juga masih diperlukan namun tetap berharap mampu memberikan manfaat bagi dunia keilmuan dan kepada semua yang sempat membaca skripsi ini pada umumnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6

A. Kriminologi.....	6
1. Definisi Kriminologi	6
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	9
3. Pembagian Kriminologi	10
4. Proses-proses Kriminalisasi, Dekriminalisasi, dan Depenalisasi.....	14
5. Aliran-Aliran Dalam Kriminologi	17
B. Kejahatan	21
1. Definisi Kejahatan	21
2. Perbedaan Antar Norma Hukum Pidana dengan Norma-norma Sosial Lainnya	23
3. Unsur-unsur Pokok untuk Menyebut Sesuatu Perbuatan Sebagai Kejahatan.....	24
4. Relativitas Pengertian Kejahatan.....	25
5. Penggolongan (Klasifikasi) Kejahatan	26
C. Pelanggaran	29
1. Pengertian Pelanggaran	29
2. Reaksi Terhadap Pelanggaran Hukum (Reacting Toward The Breaking Laws).....	30
D. Sepeda Motor	31
E. Ketentuan Pidana Penggunaan Motor <i>Racing</i>	33
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Lokasi Penelitian.....	40
B. Jenis dan Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penggunaan Motor Racing di Kabupaten Gowa.....	46

B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Untuk Meminimalisir Penggunaan Motor Racing di Kabupaten Gowa	51
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang ini transportasi menjadi hal yang sangat penting untuk masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk bepergian jauh kini masyarakat bisa dengan mudah dan cepat untuk sampai di tempat yang ingin dituju. Ini semua berkat hasil pemikiran manusia sendiri yang mampu menciptakan dan mengembangkan alat transportasi yang sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari sampai dengan saat ini. Salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat kita adalah kendaraan bermotor roda dua atau yang lebih dikenal dengan sebutan sepeda motor.

Sepeda motor memiliki sejarah yang sangat panjang di negeri ini. Sepeda motor bahkan sudah hadir sejak negara ini masih berada di bawah pendudukan Belanda dan masih bernama Hindia Belanda, Nederlands Indie.

Data yang ada menyebutkan, sepeda motor hadir di Indonesia sejak tahun 1893. Orang pertama yang memiliki sepeda motor di Indonesia adalah John C Potter yang berkebangsaan Inggris, yang sehari-hari bekerja sebagai Masinis Pertama di pabrik gula Oemboel (baca Umbul) Probolinggo, Jawa Timur.

Dalam buku *Krèta Sètan (de duivelswagen)* dikisahkan bagaimana John C Potter memesan sendiri sepeda motor itu ke pabriknya, Hildebrand und Wolfmüller, di Muenchen, Jerman. Sepeda motor itu tiba pada tahun 1893, satu tahun sebelum mobil pertama tiba di negara ini. Itu membuat John C Potter menjadi orang pertama di negeri ini yang menggunakan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sepeda adalah kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya; kereta angin. Sedangkan motor adalah mesin yang menjadi tenaga penggerak; sepeda motor; orang yang memegang peranan penting atas jalannya organisasi. Adapun definisi sepeda motor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sepeda besar yang dijadikan dengan motor.

Menurut Wikipedia, Sebuah sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuah mesin. Rodanya sebaris dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap tidak terbalik dan stabil disebabkan oleh gaya giroskopik; pada kecepatan rendah pengaturan berkelanjutan setangnya oleh pengendara memberikan kestabilan.

Racing dalam bahasa Indonesia adalah balapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, balapan adalah berbalapan; lomba adu kecepatan. Sedangkan bila hanya mengambil kata dasar dari balapan, yakni balap, maka artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia balap adalah (lomba) adu kecepatan; pacuan. Dengan ini dapat diartikan bahwa Motor *Racing* adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuah mesin yang digunakan untuk keperluan balapan.

Penjualan sepeda motor sampai pada September 2012 hanya 628.739 unit atau turun 13,1 persen dibandingkan bulan yang sama pada 2011, yaitu 723.906 unit. Dengan ini, total penjualan dalam 9 bulan pertama 2012 telah mencapai 5,391 juta unit, merosot 13,3 persen dari periode yang sama dari tahun sebelumnya 6,219 juta unit. Kendati demikian, dibandingkan dengan Agustus 2012 hanya 433.741 unit, naik 44,9 persen. "Selain kenaikan uang pangkal (DP), harga komoditas di luar Pulau Jawa yang juga turun, sangat mempengaruhi penjualan secara nasional," jelas Sigit Kumala, Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) kepada KompasOtomotif.

(<http://otomotif.kompas.com/read/2012/10/06/4599/Penjualan.Sepeda.Motor.Nasional.Merosot>.)

Banyaknya masyarakat yang menggunakan sepeda motor ternyata memberikan sebuah polemik tersendiri. Saat ini banyak pengguna sepeda motor yang ramai memodifikasi motornya (merubah dari keadaan standar pabrik). Namun beberapa ide memodifikasi sepeda motornya itu ternyata

malah dapat mengganggu dan membahayakan pengendara motor lain pada jalan umum. Misalnya tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sesuai dengan pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sehingga kegemaran masyarakat mengubah motor standar menjadi motor *racing* untuk dipakai sehari-hari pada jalan umum ini merupakan suatu masalah.

Pengaturan hukum tentang penggunaan Motor *Racing* ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Bagian Kedua tentang Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di pasal 48 ayat (1), "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan."

Dan pasal 48 ayat (3) yang berbunyi,

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. Emisi gas buang;
- b. Kebisingan suara;
- c. Efisiensi sistem rem utama;
- d. Efisiensi sistem rem parker;
- e. Kincup roda rem;
- f. Suara klakson;
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. Radius putar;
- i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Berhubung dengan hal diatas ini, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ **Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Penggunaan Motor *Racing* Pada Jalan Umum (Studi Kasus di Polresta Gowa tahun 2010-2012).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran penggunaan Motor *Racing* di Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian untuk meminimalisir penggunaan Motor *Racing* di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kedua pokok permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang menggunakan Motor *Racing* pada jalan umum di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Aparat Kepolisian untuk meminimalisir penggunaan Motor *Racing* pada jalan umum di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas kampus yang berhubungan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh *P. Topinard (1830-1911)*, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Soedjono (1985 : 3) mengemukakan pengertian kriminologi yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan hukum pidana, secara khusus mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan sekaligus mencari upaya penanggulangannya dapat ditinjau dari segi etimologi dan terminologi.

Lebih lanjut Soedjono (1985 : 4), ditinjau dari segi etimologi :

Istilah kriminologi terdiri dari dua suku kata “crime” (kejahatan) dan “logo” (ilmu pengetahuan). Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.

Moeljatno (1986 : 6) memberikan pengertian kriminologi sebagai berikut :

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan, kelakuan jelek, serta orang-orang yang bersangkutan pada kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut Undang-Undang diancam dengan pidana dan kriminalitas yang merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Delinquency (Eva, Topo, 2001 : 12) memberikan definisi mengenai kriminologi sebagai berikut :

Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat, terhadap keduanya.

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :

1. Edwin H. Sutherland : *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
2. W.A. Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
3. J. Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
4. WME. Noach : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

Edwin Sutherland seorang kriminolog Amerika Serikat yang terkemuka menyatakan bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Sutherland menyatakan *criminology is a body knowledge* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan). Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak lagi disiplin lainnya yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini.

2. Skop Kriminologi

Skop (ruang lingkup pembahasan) kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) adalah :

- a. Definisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Relativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik kejahatan

Yang dibahas dalam etiologi criminal (*breaking laws*) adalah :

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
- b. Teori-teori kriminologi, dan
- c. Beberapa perspektif kriminologi

Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (*Reacting Toward the Breaking Laws*) antara lain :

- a. Teori-teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penganggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

3. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat di bagi dalam dua golongan besar yaitu :

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

a. Antropologi Kriminal :

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya : menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya : tenggorokannya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong, dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal :

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah :

(1) Etiologi Sosial :

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.

(2) Geografis :

Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.

(3) Klimatologis :

Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal :

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :

(1) Tipologi :

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.

(2) Psikologi Sosial Kriminal :

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

d. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal :

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.

e. Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

Pelaksanaan hukum telah banyak membawa kesuksesan berupa terjaminnya keseimbangan didalam kehidupan masyarakat. Dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan dua macam hukuman yaitu hukum pidana pokok berupa hukuman pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan hukuman tutupan; dan hukum pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang serta pengumuman keputusan hakim.

Hukuman mati masih dicantumkan dalam KUHP, dengan maksud untuk mencegah adanya perbuatan pidana yang

kelewatan batas atau minimal memberikan lampu merah kepada penjahat untuk tidak berbuat kejahatan yang luar biasa. Pencantuman hukuman pidana mati ini belum menemukan adanya persesuaian faham diantara para sarjana, ada yang pro dan ada yang kontra.

b. Kriminologi Praktis :

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula di sebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

a. Hygiene Kriminal :

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*), penyediaan sarana olahraga, dan lainnya.

b. Politik Kriminal :

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyafari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukum dengan seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu

diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan.

c. Kriminalistik (*police scientific*) :

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapat dan penangkapan pelaku kejahatan.

4. Proses-proses Kriminalisasi, Dekriminalisasi, dan Depenalisasi

a. Proses Kriminalisasi

Proses kriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang mulanya tidak di anggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat.

Contoh di Inggris, perbuatan bergelandangan (*vagrancy*) semula dianggap bukan kejahatan, tetapi dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut maka bergelandangan dianggap sebagai kejahatan.

Di Indonesia, meminum minuman keras, berjudi, perbudakan, pemakaian ganja dalam masakan bukan kejahatan dalam masyarakat tradisional, beberapa puluh tahun lalu, sekarang menjadi perbuatan kriminal dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut.

Dengan dibuatnya perundang-undangan baru, antara lain UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 21/2007 tentang

Perdagangan Orang, perbuatan yang dulunya bukan dianggap kejahatan sekarang menjadi perbuatan kriminal karena perbuatan tersebut telah dilarang dan diancam pidana.

b. Proses Dekriminalisasi

Proses dekriminalisasi adalah suatu proses dimana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan. Contoh di Inggris, homoseksual merupakan kejahatan tetapi dengan adanya laporan Wolfendom Report, suatu lembaga yang meneliti nilai-nilai yang masih hidup di masyarakat Inggris yang menyatakan homoseksual bukan lagi dianggap kejahatan sehingga perbuatan homoseksual ditarik dari perundang-undangan pidana Inggris.

Demikian pula halnya dinegara-negara Skandinavia, *Abortus Provocatus Criminalis* yang dulunya dianggap kejahatan sekarang bukan lagi kejahatan.

Di Indonesia, proses dekriminalisasi “terselubung” terjadi, bukan karena pasal yang menyangkut perbuatan itu di tarik, tetapi karena ancaman pidana yang ada dalam pasal tersebut menjadi impoten (tidak diterapkan lagi). Yang di maksudkan disini adalah pasal 283 KUHP, dalam kerangka program keluarga berencana (saja).

Pasal 283 (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan... memperlihatkan tulisan, gambar atau benda..., maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan...

Dalam kenyataan perbuatan memperlihatkan alat untuk mencegah kehamilan sering dilakukan oleh petugas BKKBN namun mereka tidak lagi di pidana.

c. Proses Depenalisasi

Pada proses depenalisasi, sanksi negatif yang bersifat pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang di ancam pidana. Dalam hal ini hanya kualifikasi pidana yang dihilangkan, sedangkan sifat melawan atau melanggar hukum masih tetap di pertahankan. Mengenai hal itu, penanganan sifat melawan atau melanggar hukum diserahkan pada sistem lain, misalnya sistem Hukum Perdata, sistem Hukum Administrasi dan seterusnya.

Di dalam proses depenalisasi timbul suatu kesadaran, bahwa ppidanaan sebenarnya merupakan *ultimum remidium*. Oleh karena itu terhadap perilaku tertentu yang masih dianggap melawan atau melanggar hukum dikenakan sanksi-sanksi negatif nonpidana yang apabila tidak efektif akan diakhiri dengan sanksi pidana sebagai senjata terakhir dalam keadaan darurat. Hal ini berarti bahwa hukum pidana dan sistemnya merupakan suatu hukum darurat (*=noodrecht*) yang seyogyanya diterapkan pada instansi terakhir.

5. Aliran-Aliran Dalam Kriminologi

a. Spirtualisme

Dalam penjelasan dalam kejahatan, spirtualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda dengan teori-teori saat ini spirtualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau Dewa, dan keburukan yang datang dari Setan. Seseorang yang melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan (*evil/demon*).

Landasan pemikiran yang paling rasional dari pemikiran ini adalah bahwa pada periode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai permasalahan sebagai korban dan keluarga korban dengan pelaku dan keluarganya. Akibatnya adalah konflik berkepanjangan antara keluarga yang dapat mengakibatkan musnahnya keluarga tersebut. Juga menjadi masalah adalah bahwa pelaku kejahatan yang berasal dari keluarga yang memiliki posisi kuat dalam masyarakat yang akan dapat dihukum.

b. Naturalisme

Perkembangan paham naturalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Lahirnya rasionalisme di Eropa menjadikan pendekatan ini mendominasi pemikiran tentang penyebab kejahatan.

Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, dapat dibagi beberapa aliran :

1) Aliran Klasik

Landasar pemikiran aliran klasik adalah sebagai berikut :

- a. Individu dilahirkan dengan kehendak bebas (*free will*) hidup menentukan pilihannya sendiri.
- b. Dalam bertindak laku, manusia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya sendiri (*hedonism*).
- c. Individu memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan.
- d. Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah.
- e. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan bagian terbesar dari masyarakat.
- f. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, oleh karena itu kejahatan merupakan kejahatan moral.
- g. Hukumnya hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukumnya adalah untuk mencegah kejahatan dikemudian hari.

- h. Setiap orang dianggap sama dimata hukum, oleh karena itu seharusnya setiap orang diperlakukan sama.

Penganut aliran ini adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham.

2) Aliran Positivis

Aliran positivis terbagi atas dua bagian besar yakni : Pertama Determinasi Biologi (biological determinism) perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.. Kedua Determinasi Kultural (cultural determinism) mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan dimana seseorang itu hidup.

Para ilmuan ini tidak cukup hanya dengan berfikir untuk meningkatkan dan memodernisasikan peradaban masyarakat, tatapi mereka lebih banyak keinginan untuk menjelaskan semua gejala kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat.

Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akal nya disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Secara singkat, aliran ini berpegang teguh pada keyakinan bahwa seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat (*cause-affect relationship*).

Landasan pemikiran aliran positif adalah sebagai berikut :

- a. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat.
- b. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia.
- c. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalisasi. Abnormalisasi ini mungkin terletak pada diri individu atau juga pada lingkungannya.
- d. Tanda-tanda abnormalisasi tersebut hanya dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal.
- e. Abnormalisasi tersebut dapat diperbaiki dan karenanya penjahat dapat diperbaiki.
- f. *Treatment* lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dan sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.

3) Aliran *Social Defence*

Aliran *social defence* yang dipelopori oleh Judge Marc Angel telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. Munculnya aliran ini disebabkan oleh aliran positif klasik dianggap terlalu statis dan kaku dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun demikian, arti *social defence* berbeda dengan yang dimaksud oleh tokoh aliran positif, yaitu :

- a. *Social defence* tidak bersifat deterministik.

- b. *Social defence* menolak tipologi yang bersifat kaku tentang penjahat dan menitikberatkan pada keunikan kepribadian manusia.
- c. *Social defence* meyakini sepenuhnya nilai-nilai moral.
- d. *Social defence* menghargai sepenuhnya kewajiban-kewajiban masyarakat terhadap penjahat. Dan mencoba menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan penjahat serta menolak mempergunakan pendekatan yang bersifat *security* sebagai suatu alat administratif.
- e. Sekalipun mempergunakan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan namun *sosial defence* menolak dikuasai olehnya dan menggantikannya dengan sistem yang modern “politik kriminal”.

B. Kejahatan

1. Definisi Kejahatan

Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Sutherland berpendapat bahwa *Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law No matter what the degree of immorality,*

reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah : setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat : Contoh di dalam hal ini adalah : bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat muslim, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

2. Perbedaan Antar Norma Hukum Pidana dengan Norma-norma Sosial Lainnya

Di dalam setiap masyarakat terdapat sejumlah norma yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku anggota-anggota masyarakatnya, Dikenal adanya norma agama, adat istiadat, dan norma hukum. Untuk membedakan norma agama, adat istiadat, dan lain-lainnya dengan norma hukum, khususnya norma hukum pidana sebagai berikut : norma hukum

adalah sejumlah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku orang-orang yang telah dikeluarkan oleh pejabat politik, yang berlaku secara sama untuk semua kelas dan golongan dan disertai sanksi kepada pelanggar-pelanggarnya yang dilakukan oleh negara.

Dengan memperhatikan definisi diatas, maka terlihat ada 4 unsur esensial (pokok) yang merupakan cirri khas hukum pidana, yakni :

1. Sifat politisnya, yakni peraturan-peraturan yang ada dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi buruh, gereja, sindikat, dan lain-lainnya tidak dapat disebut sebagai hukum pidana meskipun peraturan tersebut sangat mengikat anggotanya dan mempunyai sanksi yang tegas.
2. Sifat spesifiknya, yakni karena hukum pidana memberikan batasan tertentu untuk setiap perbuatan. Misalnya, dibedakan antara pencurian biasa dengan pencurian kekerasan.
3. Sifat uniform atau tanpa pilih bulu yaitu berusaha memberi keadilan pada setiap orang tanpa membedakan status sosial seseorang.
4. Sifat adanya sanksi pidana, yakni adanya ancaman pidana oleh negara.

3. Unsur-unsur Pokok untuk Menyebut Sesuatu Perbuatan Sebagai Kejahatan

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah :

1. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP (asas legalitas).
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang teratur didalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

4. Relativitas Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah), baik ditinjau dari sudut pandang hukum (*lega definition of crime*), maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat (*sociological definition of crime*).

1. Isi pasal-pasal dalam hukum pidana sering berubah. Contoh : Undang-undang narkoba yang lama yakni UU No 9 Tahun 1976 digantikan oleh undang-undang yang baru, UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

2. Pengertian kejahatan menurut anggapan suatu masyarakat tertentu juga selalu berubah, Contoh : di Sulawesi Selatan beberapa puluh tahun lalu, seorang bangsawan putri dilarang kawin dengan laki-laki biasa/bukan bangsawan. Barang siapa melanggarnya dianggap melakukan kejahatan berat. Norma tersebut sekarang ini tidak berlaku lagi.
3. Pengertian kejahatan sering berbeda dari suatu tempat ketempat yang lain, dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya, ada daerah bila kedatangan tamu terhormat, sang tamu tersebut disodori gadis untuk menemaninya tidur. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan terpuji ditempat tersebut, sedangkan ditempat lain (kebudayaan lain), hal itu merupakan suatu hal yang memalukan (jahat). Ada juga daerah, dimana bila ada laki-laki bersedia menukar istrinya dengan dua ekor babi, ia dengan segala senang hati melakukannya, dan perbuatan itu bukan kejahatan. Tentunya di daerah lain, perbuatan menukar istri dengan babi merupakan perbuatan jahat.
4. Di dalam penerapan hukum juga sering berbeda. Suatu tindakan yang serupa, kadang-kadang mendapat hukuman yang berbeda dari hakim yang berbeda pula. Contohnya si A mencuri ayam mendapat hukuman 3 bulan penjara dari hakim X, sedangkan si B mencuri ayam pula tetapi divonis 1 tahun penjara oleh hakim Y. Kadang-kadang terdapat banyak contoh-contoh di dalam kasus

korupsi, misalnya : pada tingkat pengadilan negeri di jatuhkan vonis 9 tahun penjara, sedangkan di tingkat pengadilan tinggi hanya divonis 3 tahun penjara dan di tingkat kasasi orang tersebut bebas.

5. Sering juga terlihat adanya perbedaan materi hukum pidana antara suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Contoh : pelacuran rumah bordil (*brothel prostitution*) di Australia dilarang di dalam KUHP Australia, sedangkan pelacuran di negeri Belanda tidak dilarang.

5. Penggolongan (Klasifikasi) Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan :

1. Motif Pelakunya.

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut :

- a. Kejahatan Ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan.
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zina, pasal 284 KUHP.
- c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI/TI, dll.
- d. Kejahatan lain-lain (*miscellaneous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

2. Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidana.

- a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebutkan didalam buku ke II (dua) KUHP, seperti pembunuhan, pencurian, dll. Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut *felony*. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
- b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam buku ke III (tiga) KUHP, seperti sanksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran ini dalam bahasa Inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukumannya denda saja.

Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

3. Kepentingan Statistik.

- a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan, dll.
- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan, dll.
- c. Kejahatan terhadap kesusialaan umum (*crime against public decency*), misalnya perbuatan cabul.

4. Kepentingan Pembentukan Teori.

Penggolongan ini berdasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah :

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contoh : pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh : pemerasan, perdagangan gelap narkoba, perjudian liar, dan pelacuran.
- c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan, Contoh : pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan, dan lain-lain.

C. Pelanggaran

1. Pengertian Pelanggaran

Kata dasar pelanggaran adalah langgar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti tempat ibadah, tubruk, laga, landa. Melanggar artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda. Pelanggaran artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.

Pelanggaran terhadap pada buku ketiga KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran itu sendiri. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan daripada pelaku kejahatan.

Menurut Rusli Efendy dan Ny. Poppy Andi Lolo (1989:74) bahwa :

Pelanggaran adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang mengaturnya.

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Reaksi Terhadap Pelanggaran Hukum (Reacting Toward The Breaking Laws)

Penanggulangan kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :

❖ Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif

adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu Niat + Kesempatan terjadi Kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga-jaga. Hal itu selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-entif faktor **NIAT** tidak terjadi.

❖ Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Entif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah **kesempatan** untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada di tempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif **kesempatan** ditutup.

❖ Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

D. Sepeda Motor

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sepeda adalah kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya; kereta angin. Sedangkan motor adalah mesin yang menjadi tenaga penggerak; sepeda motor; orang yang memegang peranan penting atas jalannya organisasi. Adapun definisi sepeda motor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sepeda besar yang dijadikan dengan motor.

Menurut Wikipedia, Sebuah sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuah mesin. Rodanya sebaris dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap tidak terbalik dan stabil disebabkan oleh gaya giroskopik; pada kecepatan rendah pengaturan berkelanjutan setangnya oleh pengendara memberikan kestabilan.

Motor banyak variasinya : beberapa motor dilengkapi dengan papan kaki dan bukan “gagang *injekan*”, seperti motor Tiongkok, dan mobil samping dan juga beroda tiga, yang biasa disebut *trike*.

Sepeda motor memiliki sejarah yang panjang di negeri ini. Sepeda motor sudah hadir sejak negara ini berada dibawah pendudukan Belanda dan masih bernama Hindia Timur, Oost Indie atau East India.

Data yang ada menyebutkan, sepeda motor hadir di Indonesia sejak tahun 1893 atau 118 tahun yang lalu. Uniknya, walaupun pada saat itu Negara ini masih berada dibawah pendudukan Belanda, orang pertama yang memiliki sepeda motor di negeri ini bukanlah orang Belanda, melainkan orang Inggris. Dan, orang itu bernama John C Potter, yang sehari-hari bekerja sebagai masinis pertama di pabrik gula Oemboel (baca Umbul) Probolinggo, Jawa timur.

Sepeda motor buatan Hildebrand und Wolfmuller itu belum menggunakan rantai, belum menggunakan persneling, belum menggunakan magnet, belum menggunakan aki (*accu*), belum menggunakan koil, dan belum menggunakan kabel-kabel listrik.

Sepeda motor itu menyandang mesin dua silinder horizontal yang menggunakan bahan bakar bensin atau nafta. Diperlukan waktu 20 menit untuk menghidupkan dan menstabilkan mesinnya.

E. Ketentuan Pidana Penggunaan Motor Racing

1. Pengertian Pidana

Istilah pidana sering juga disebut dengan hukuman. “Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa”. Sudarto (Ninie Suparni, 1996:11)

Sedangkan dalam penjelasan KUHP, “Yang dimaksud dengan pidana (hukuman) adalah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana”.

2. Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan bertujuan untuk :

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam KUHP pasal 10 terdapat jenis pidana, yaitu :

Pidana pokok yang terdiri dari :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara

3. Pidana kurungan

4. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hukum

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdiri atas pidana kurungan dan pidana denda.

Pidana kurungan adalah bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi terdakwa yaitu pemisahan terdakwa dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu yang sifatnya sama dengan hukuman penjara. (Ninie Suparni, 1996:23). Dalam pasal 18 KUHP dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, sedangkan maksimal kurungan dapat bertambah sampai 1 tahun 4 bulan, apabila terdapat adanya gabungan kejahatan (*concursum*), pengulangan kejahatan (*recidive*) atau karena ketentuan pasal 52. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika orang tersebut/terpidana tidak dapat atau tidak dapat membayar denda yang harus dibayarnya menyangkut perkara yang tidak begitu berat.

Pidana denda adalah hukuman yang dikarenakan kepada kekayaan seseorang yang melakukan delik-delik ringan berupa

pelanggaran atau kejahatan ringan. (Ninie Suparni:24). Pidana denda termasuk dalam jenis pidana berupa pembayaran baik kepada penguasa maupun sebagai pengganti kerugian kepada korban. Bentuk pembayaran ini mulai dari bentuk uang sampai bentuk "*in natura*", seperti ternak, hasil kebun, dan lain sebagainya.

Menurut pasal 30 KUHP dikatakan bahwa jumlah denda itu sekurang-kurangnya 25 sen, bila denda tidak dibayar, Maka harus diganti dengan pidana kurungan yang sekurang-kurangnya itu ditetapkan dalam putusan hakim bahwa untuk denda setengah rupiah atau kurang diganti dengan tidak lebih dari satu hari demikian juga sebaliknya yang belum cukup setengah rupiah, pidana kurungan dapat dijatuhkan selamamanya delapan bulan dalam hal denda maksimalnya ditambah karena adanya gabungan kejahatan, pengulangan kejahatan atau karena ketentuan pasal 52 KUHP.

Adapun pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana yang berkaitan judul penelitian ini yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu sebagai berikut :

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285 ayat (1)

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagai mana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) *juncto* pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama¹ (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu).

Ada beberapa teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan pemidanaan) yaitu :

a. Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie/retribusi*)

Hal ini antara lain dikemukakan oleh E. Kant, yang mengemukakan teori balas dendam, “siapa yang membunuh harus dibunuh pula”. Menurut teori pembalasan ini, orang yang berbuat jahat harus dipidana dengan disiksa fisiknya, agar dia menjadi jera. Pelaksanaanya tentunya sangat kejam. Pada mulanya, pihak yang dirugikan (pihak korban) diperbolehkan membalas setiap perlakuan jahat yang diterimanya, namun hak ini kemudian diambil alih oleh negara.

b. Teori Penjeraan (*afschriking/deterrence*)

Teori ini sering disebut juga “teori menakut-nakuti”. Feurbach berpendapat bahwa hukuman harus dapat menakuti orang supaya jangan berbuat jahat.

c. Teori Penutupan (*onschadelik/incarceration*)

Pengasingan (penutupan) adalah suatu doktrin yang menyatakan tindakan karantina memang sangat penting dan diperluukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah pengulangan kejahatan oleh penjahat-penjahat yang berbahaya.

d. Teori Memperbaiki (*verbeterings/rehabilitasi*)

Teori ini beranggapan bahwa tujuan dijatuhkannya pidana pada pelanggar hukum adalah untuk memperbaiki si terhukum itu sendiri. Proses ini disebut proses rehabilitasi, resosialisasi atau pemasyarakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Polresta Gowa khususnya dibagian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dengan pertimbangan bahwa Satlantas Polresta Gowa adalah instansi yang berwenang dan memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan-keterangan ataupun data-data yang sangat akurat dalam penelitian penulis.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini yaitu Kesatuan Lalu Lintas Polresta Gowa dan pelaku pengguna Motor *Racing*.
2. Data Sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dengan metode :

1. Metode penelitian kepustakaan (*library search*)

Dengan metode ini penulis memperoleh data dan informasi dengan cara membaca berbagai buku, majalah, koran, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang mempunyai ketertarikan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Metode penelitian lapangan

Dengan metode ini penulis memperoleh data dan informasi dengan melakukan penelitian langsung di lapangan melalui proses wawancara terhadap petugas kepolisian dan pelaku pengguna Motor *Racing*.

D. Teknik Analisis Data

Sistem analisis data yang akan digunakan penulis setelah memperoleh data primer dan data sekunder yaitu *Analisis Yuridis Deskriptif*, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai terjadinya pelanggaran lalu lintas penggunaan Motor *Racing* dan upaya Kesatuan Lalu Lintas Polresta Gowa dalam menanggulangi untuk meminimalisir penggunaan Motor *Racing* pada jalan umum.

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh penjelasan, gambaran, dan uraian yang bersifat deskriptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi Books.
- Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Effendi, Rusli, dan Ny. Poppy Andi Lolo. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang. Lembaga Pencetakan dan Penerbitan Umi.
- Habnit, F.F. 1977. *Krèta Sètan, de duivelswagen : Autopioniers van Insulinde*. Den Haag. Tong Tong.
- Moeljatno, L. 1986. *Kriminologi*. Jakarta. Bina Aksara.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia.
- Sukanto, Soerjono, dkk., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1986.
- Suparni, Niniek. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sutherland, Edwin H., *Criminology*, J. B. Lippincott Company, New York. 1970.
- Tim Penyusun KBBI. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta. Balai Pustaka.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Halaman Situs

(<http://otomotif.kompas.com/read/2012/10/06/4599/Penjualan.Sepeda.Motor.Nasional.Merosot>.)

(http://wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor)